

**Society, 7 (2), 125-145, 2019****P-ISSN: 2338-6932 | E-ISSN: 2597-4874****<https://society.fisip.ubb.ac.id>**

Pemetaan Sosial terhadap Sumberdaya dan Aksesibilitas Nelayan dalam Kebijakan Pembangunan Wisata Pesisir

Evi Sukmayeti 

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mataram,
83134 Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia; evi.sukmayeti@gmail.com

INFO ARTIKEL

Info Publikasi:

Artikel Hasil Penelitian

Sitasi Cantuman:

Sukmayeti, E. (2019). A Social Mapping of Fishermen Resource and Accessibility for Coastal Tourism Development Policy. *Society*, 7(2), 116-134.

DOI : [10.33019/society.v7i2.101](https://doi.org/10.33019/society.v7i2.101)

Hak Cipta © 2019. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society



Artikel dengan akses terbuka.

Lisensi: Atribusi-NonKomersial-BerbagiSerupa (CC BY-NC-SA)

ABSTRAK

Nelayan belum menikmati dengan baik kesejahteraan dari sumber daya laut Indonesia. Cara-cara meningkatkan kesejahteraan nelayan di luar sektor perikanan sudah dimiliki oleh pemerintah. Salah satunya mengaitkan nelayan, pesisir dan wisata. Meninting di Lombok Barat adalah desa pesisir yang strategis di sektor pariwisata. Desa ini sudah mulai melakukan pengembangan destinasi wisata sejak tahun 2011, namun sayangnya tidak ada data mengenai nelayan sebagai kelompok kepentingan yang riil. Penelitian ini mengembangkan pola penelitian-penelitian tentang masyarakat nelayan pada umumnya yang membahas secara terpisah antara sumberdaya sosial nelayan dan aspek politik masyarakat nelayan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode pemetaan sosial. Data diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap informan yang dipilih secara purposif. Data terkait dengan sumber daya nelayan disajikan dalam bentuk peta, diikuti dengan analisis mengenai aksesibilitas mereka terhadap kebijakan. Aspek spasial memperkuat sumberdaya sosial yang dimiliki nelayan, kepentingan dan aksesibilitas mereka terhadap pembangunan wisata pesisir. Penelitian menunjukkan sumber daya sosial nelayan di Desa Meninting tersebar tidak merata pada lima dusun. Indikator yang ditunjukkan adalah; kepemilikan modal, penguasaan pengetahuan dan keterampilan, kepemilikan alat produksi, penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemampuan diversifikasi hasil produksi, hubungan sosial-politik nelayan dan kemampuan untuk mengenali prospek ekonomi wisata pesisir. Nelayan yang tinggal di wilayah yang langsung berhadapan dengan laut memiliki sumberdaya sosial yang lebih baik dan kepentingan yang lebih tegas terhadap pembangunan pesisir. Aksesibilitas kelompok nelayan terbatas

Dikirim: 21 Oktober, 2019;
Diterima: 4 Desember, 2019;
Dipublikasi: 25 Desember, 2019;

dalam kebijakan pembangunan tersebut. Hanya nelayan-nelayan di dusun pesisir yang mampu menunjukkan diri sebagai defenders. Sementara nelayan-nelayan yang tinggal berjauhan dari pantai cenderung latents atau bahkan apathetic. Penelitian ini merekomendasikan perlunya kajian sosio-spasial lainnya mengenai karakteristik masyarakat pesisir dan perlunya pemerintah memanfaatkan informasi sosio-spasial masyarakat nelayan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang memuat aspek kewilayahan dalam pembangunan wisata pesisir.

Kata Kunci: *Meninting; Nelayan; Pembangunan Wisata; Pemetaan Sosial; Pesisir; Sumberdaya*

1. Pendahuluan

Pemerintah Indonesia memandang bahwa masyarakat nelayan belum mampu menikmati kekayaan bahari Indonesia. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan Kementerian Pariwisata (Kemenpar) sependapat mengenai hal ini (Mongabay, 8 Februari 2017). Begitu pula yang terjadi pada masyarakat nelayan di Nusa Tenggara Barat (NTB). Nelayan di NTB yang berjumlah lebih dari 74.000 orang nelayan hingga tahun 2012 (diolah dari Satu Data Indonesia, 2012) dihadapkan pada kenyataan sebanyak hampir 14.000 rumah tangga miskin bekerja di sektor perikanan tangkap (Badan Pusat Statistik, 2012). Oleh karenanya, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan, dan Perikanan (KKP) berupaya meningkatkan kesejahteraan nelayan. Tahun 2017 KKP berhasil meningkatkan rata-rata pendapatan nelayan menjadi Rp 3,16 juta per nelayan/bulan (Berita Kementerian Kelautan dan Perikanan, 12 Januari 2018). Dari angka tersebut, sebenarnya bisa dikatakan rumah tangga nelayan tidak lagi termasuk kategori miskin sebagaimana standar Badan Pusat Statistik untuk besaran pengeluaran harian nelayan kategori miskin adalah di bawah Rp. 600.000/bulan (Keluargaharapan.com, 2 Oktober 2016).

Pulau Lombok, tiga tahun terakhir mencetak prestasi internasional di beberapa kategori wisata halal. Sekalipun dalam konsep wisata halal yang digaungkan belum tegas dan didukung oleh kenyataan di lapangan (Scott, 2017), yang jelas ini berhasil memantik semangat pemerintah desa dan masyarakat untuk ikut memanfaatkan momentum bernilai ekonomis.

Desa Meninting terletak di pintu masuk Kawasan Wisata Senggigi di Pulau Lombok. Desa ini memiliki potensi wisata bahari yang cukup lengkap berupa muara Kali Meninting dan pantai di sepanjang barat yang langsung berhadapan dengan Pulau Bali. Lokasinya sangat strategis untuk pengembangan destinasi wisata dikarenakan memiliki wilayah yang akan dilalui wisatawan yang berkunjung ke Senggigi namun berbatasan dengan Kota Mataram sehingga lebih mudah dan cepat untuk dijangkau. Sejak tahun 2011, Desa Meninting sebenarnya sudah dirintis sebagai lokasi wisata kuliner. Tahun 2017, Pemerintah Desa menggelar Festival Bekele Tongkol yang dijadikan acara tahunan. kegiatan ini diharapkan membuat Desa Meninting menjadi ramai dikunjungi sebagai daerah wisata baru (Pos Bali, 17 Desember 2017). Desa Meninting memiliki potensi pesisir pantai yang luas dan ombak yang menantang, strategis untuk lokasi wisata *surfing* (Radar Lombok, 30 Oktober 2017). Untuk itu pemerintah desa serius mempersiapkan pembangunan kawasan wisata, antara lain Kawasan Wisata Muara Meninting yang menurut pemetaan akan berdampak pada relokasi 30 rumah

warga di Dusun Kongok (Radar Lombok, 24 Februari 2017). Namun demikian ada kekhawatiran tentang posisi masyarakat tempatan yang sekadar menjadi penonton kebijakan pemerintah karena kalah oleh investor dan Tenaga Kerja Asing (TKA). Beberapa kepala desa meminta pemerintah daerah untuk mengawasi kesempatan TKA untuk bekerja di wilayah mereka (Batulayar News, 17 februari 2016).

Pemerintah Desa Meninting tidak memiliki catatan mengenai jumlah, lokasi permukiman, sumber daya yang dimiliki dan sebagainya mengenai masyarakat nelayan di wilayah pemerintahannya. Identitas kelompok nelayan yang mewakili informasi keberadaan nelayan juga tidak diarsipkan dengan baik. Pemerintah Desa Meninting menyebutkan bahwa hal tersebut dikarenakan kelompok nelayan hanya dapat mereka ketahui secara riil ketika adanya bantuan dana atau alat dari pemerintah ketika kelompok nelayan beramai-ramai membentuk diri dan meminta surat keterangan untuk keperluan administrasi proposal bantuan. Setelah program bantuan berakhir, beberapa kelompok nelayan bubar. Sayangnya, surat keterangan yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah desa pun tidak diarsipkan. Tidak terdatanya nelayan dan kelompok nelayan dengan baik, jika dihadapkan dengan keberadaan program pembangunan destinasi wisata pesisir di Meninting yang sudah dirintis sejak 2011, menyebabkan rendahnya pelibatan masyarakat nelayan sebagai masyarakat yang dominan menghuni daerah pesisir dalam kegiatan pembangunan dan tentu memiliki kepentingan terhadap pembangunan ruang hidup mereka. Rencana memanfaatkan ruang pesisir Meninting oleh pemerintah desa untuk pembangunan wisata pesisir, harus menyertakan masyarakat yang menghuni areal tersebut. Potensi masyarakat harus dipetakan.

Dalam studi akademik, metode pemetaan sosial digunakan oleh banyak bidang. Dalam penelitian-penelitian bertema pembangunan, pemetaan sosial menggabungkan aspek sosial dan spasial sekaligus dan terkait. Metode sosio-spatial membantu penelitian-penelitian yang terkait dengan tatakelola (*governance*) areal untuk memahami sisi kesetaraan, efisiensi dan transparansi (Alemie, Bennett, & Zavenbergen, 2015). Dalam penelitian spesifik wilayah pesisir, metode ini digunakan untuk membantu perencanaan tatakelola bahari secara spasial yang rawan konflik pemanfaatan (Moore *et al.*, 2016). Pemetaan sosial terhadap kawasan wisata pesisir di Indonesia masih belum menjadi kepentingan utama. Penelitian yang dilakukan di Kabupaten Pesisir Barat merumuskan zonasi ekowisata bahari yang potensial (Herison, Romdania, & Yosua, 2018). Sementara penelitian yang dilakukan di Kampung Pasie Nan Tigo Kota Padang menghasilkan zonasi ancaman kerawanan bencana terhadap kawasan wisata kampung nelayan (Haryani, 2014). Kedua penelitian tersebut memanfaatkan pemetaan untuk merumuskan pemanfaatan lingkungan fisik sebuah kawasan untuk kegiatan pariwisata. Sementara penelitian ini sebaliknya ditujukan untuk mempelajari karakteristik spasial masyarakat pesisir terutama nelayan dalam hal sumberdaya dan respon mereka terhadap pembangunan wisata pesisir. Pemetaan sosial secara spasial terhadap kelompok nelayan di Meninting, dapat digunakan oleh pemerintah desa dan pengguna hasil penelitian sebagai gambaran mengenai potensi nelayan menurut ruang hidup mereka dimana pembangunan wisata akan dipusatkan.

Pemetaan Sosial memiliki beberapa aspek antara lain; statistik, antropologis dan berorientasi pada jaringan (Safiullin *et al.*, 2015). Safiulin *et al.*, (2015) memberikan contoh aplikasi pemetaan sosial berupa peta geografis yang memuat simbol-simbol kategorisasi sosial yang terhubung satu sama lain. Cara tersebut berbeda dengan yang dicontohkan oleh Saribanon, *et al.*, (2015) yang mendokumentasikan kajian pemetaan sosial terhadap daerah Gilireng dimana luarannya berupa identifikasi aspek sosial responden secara terpisah antara aspek kewilayahan dan aspek sosial yang dimiliki oleh responden. Namun demikian, kedua

riset pemetaan sosial tersebut sama-sama menunjukkan bahwa aspek peta secara geografis dan aspek sosial yang dikaji dalam pemetaan sosial adalah dua aspek yang harus ditampilkan dan terkait satu sama lainnya.

Jika dikaitkan dengan manfaat pemetaan sosial terhadap kebijakan publik, maka satu hal yang penting adalah ketika kebijakan publik tersebut melibatkan komunitas yang relatif kecil dan memiliki aspek kewilayahan tertentu. Setiap kebijakan publik memiliki kelompok targetnya sendiri. Sebuah kebijakan yang bernilai spasial, tentu akan mempengaruhi aspek spasial wilayahnya dan dapat dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan spasial pula. Dunn (2000) menyebutkan bahwa kelompok target bukan serta-merta kelompok yang akan merasakan manfaat, bahkan bisa jadi kelompok target menerima kerugian atau menjadi kelompok penderita. Dalam melakukan riset pemetaan sosial terhadap fenomena partisipasi dalam kebijakan publik, analisis kelompok target tidak dapat dihindari. Analisis kelompok target (yang akan disajikan dalam sebuah analisis spasial) dibutuhkan dengan tujuan: (1) Memahami perbedaan-perbedaan sosial dalam populasi (berdasarkan gender, strata sosial, usia, identitas etnis) dan hal-hal lainnya di dalam masyarakat, sehingga masyarakat tersebut bisa ikut berpartisipasi (dalam kebijakan publik); (2) Memahami persepsi dan perilaku kelompok target terhadap pemangku kepentingan dan institusi lainnya, dan untuk membangun strategi yang realistis untuk bisa berpartisipasi; (3) Untuk mengukur resiko dan dampak sebuah gagasan atau strategi program (Forster dan Osterhaus, 2011). Oleh karenanya, pemetaan sumberdaya sosial nelayan Meninting secara spasial akan mengantarkan pemahaman tentang perbedaan sumberdaya sosial nelayan dan perbedaan perilaku dan persepsi nelayan terhadap pembangunan wisata pesisir menurut areal bermukim.

Hasil penelitian ini bertujuan untuk (1) Menggambarkan peta sosial sumberdaya yang dimiliki masyarakat nelayan Desa Meninting menurut areal bermukim dan (2) Aksesibilitas nelayan menurut sebaran spasial sumberdaya yang mereka miliki, sebagai pemangku kepentingan dalam kebijakan pengembangan destinasi wisata di Desa Meninting. Penelitian ini pada dasarnya melanjutkan titik tolak penelitian-penelitian sebelumnya yang umumnya hanya menggambarkan sumberdaya yang dimiliki nelayan dan dampak yang dialami oleh nelayan sebagai implikasi dari pembangunan wisata bahari atau pesisir.

2. Tinjauan Pustaka

A. Sumberdaya Masyarakat Nelayan

Nelayan menjadi komunitas yang paling sering dijumpai pada wilayah pesisir. Bagi komunitas ini, kedekatan tempat tinggal mereka dengan laut, akan memangkas banyak biaya seperti transportasi dan memang interaksi sehari-hari dengan laut melahirkan pemahaman yang paling nyata untuk mencari nafkah.

Masyarakat nelayan memiliki sisi kehidupan yang dapat ditinjau dari beberapa aspek. Dari aspek politik, penelitian yang dilakukan oleh Royandi, Satria dan Saharuddin menunjukkan bahwa nelayan merupakan salah satu aktor yang turut membangun kekuasaan melalui mekanisme akses berbasis hak, dan mekanisme akses berbasis struktur dan relasi sosial. Basis kekuasaan modal, pasar, teknologi, pengetahuan, identitas sosial, otoritas, dan patron-klien dijelaskan sebagai sumberdaya nelayan untuk mengakses sumberdaya laut di Palabuhanratu (Royandi, Satria, & Saharuddin, 2019).

Selain kondisi sosial-budaya, penelitian terhadap komunitas nelayan menyebutkan beberapa karakteristik masyarakat nelayan seperti keikutsertaan dalam organisasi sosial, penggunaan alat teknologi, pengetahuan dan keterampilan yang diturunkan kepada keturunan mereka, pendapatan, pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal, kesehatan dan

pendidikan anak (Fitriyah & Widodo, 2016). Sementara penelitian lain melihat bahwa sumberdaya komunitas nelayan tercermin dari kepemilikan modal dan alat produksi serta relasi bisnis antarnelayan yang tergambar dalam tiga strata yakni nelayan buruh (lapisan bawah), nelayan pemilik (lapisan menengah) dan pemodal (lapisan atas) (Saleha, 2013). Karakteristik-karakteristik tersebut dapat menjadi sumberdaya komunitas nelayan dalam mempengaruhi kebijakan yang terkait dengan pekerjaan dan kehidupan mereka.

Selanjutnya artikel ini akan memaparkan sumberdaya sosial yang dimiliki nelayan Meninting untuk mengakses kebijakan pembangunan berupa: (1) Penguasaan modal sebagai basis ekonomi pengaruh dan kepentingan, (2) Pengetahuan dan keterampilan untuk menggambarkan kapasitas produksi, (3) Penggunaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) untuk menggambarkan kapasitas sosial individu nelayan, (4) Kemampuan mengenali prospek ekonomi untuk menggambarkan aspek kepentingan nelayan, (5) Diversifikasi hasil produksi untuk menggambarkan kapasitas ekonomi sebagai produsen di sektor wisata bahari, (6) Pemilikan alat produksi untuk menggambarkan strata ekonomi nelayan dalam kaitannya dengan pengaruh terhadap kebijakan dan (7) Relasi ekonomi politik untuk menggambarkan aktivitas pengaruh dan kepentingan nelayan dalam sistem kebijakan.

Dalam konteks pengembangan wisata bahari atau pesisir, terutama memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan pantai, komunitas nelayan menunjukkan ragam interaksinya terhadap pembangunan itu sendiri. Pertama, komunitas nelayan bisa jadi pelaku utama pengembangan destinasi wisata seperti contoh di Kabupaten Agam (Zamzami, 2016). Kedua, komunitas nelayan menjadi pelaku yang pasif, terlibat dalam pengembangan destinasi wisata atas dorongan pihak lain seperti pemerintah atau investor seperti halnya di Pasie Nan Tigo, Kota Padang (Huda, 2016). Ketiga, komunitas nelayan menjadi pelaku yang sama sekali terpisah dari kegiatan pengembangan wisata pesisir dimana mereka hidup. Ini seperti yang diidentifikasi pada pengembangan wisata bahari Tanjung Benoa yang menyebabkan menurunnya kuantitas dan kualitas hasil tangkapan serta intensitas melaut oleh nelayan (Pratiwi, 2014).

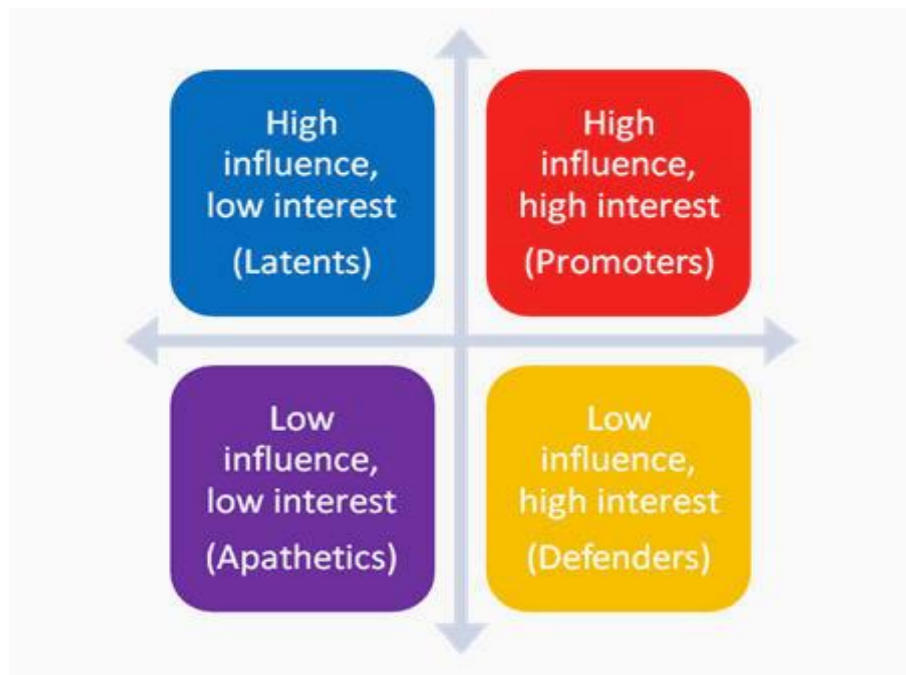
B. Aksesibilitas Pemangku Kepentingan terhadap Kebijakan Publik

Dalam menentukan aksesibilitas atau kemampuan aktor-aktor untuk mengakses manfaat kebijakan publik, diperlukan analisis pemangku kepentingan. Analisis pemangku kepentingan antara lain membantu dalam mengumpulkan perspektif yang lebih lengkap tentang sektor dan elemen yang dipengaruhi oleh kebijakan, memperkuat posisi pihak yang memiliki oposan, meningkatkan kredibilitas organisasi dan mengantarkan pihak yang terlibat dalam kebijakan publik sukses menggapai tujuan mereka (Community Tools Box, 2014).

Dalam mengidentifikasi aksesibilitas pemangku kepentingan terhadap kebijakan diperlukan identifikasi tentang: (1) Kepentingan pribadi aktor, (2) Tingkat pengetahuan terhadap isu kebijakan, (3) Sumberdaya, (4) Kapasitas mengarahkan sumberdaya, dan (5) Posisi dalam isu tersebut; mendukung, netral atau menolak (disarikan dari Policy Stakeholders Analysis Tool oleh Policy Circle, 2019). Kategorisasi terhadap pemangku kepentingan jika dikaitkan dengan aksesibilitas mereka sangat relevan menggunakan kuadran yang dirumuskan oleh Center for Community Health and Development University of Kansas yakni *promoters*, *defenders*, *latents* dan *apathetic* sebagaimana dapat dicermati pada Gambar 1 (Center for Community Health and Development University of Kansas, 2014). *Promoters* adalah mereka yang memiliki kepentingan dan pengaruh yang tinggi terhadap kebijakan. *Defenders* adalah aktor yang memiliki kepentingan yang tinggi terhadap kebijakan

namun hanya sedikit dapat memengaruhi. Sementara itu, *latents* mewakili mereka yang memiliki pengaruh yang tinggi namun sayangnya hanya memiliki sedikit kepentingan, dan *apathetic* menggambarkan orang-orang yang memiliki kepentingan sekaligus pengaruh yang kecil terhadap kebijakan. Sebagai sebuah kuadran, keempat kategori ini disebutkan dapat mengalami dinamika sehingga satu kategori dapat berkembang menjadi kategori yang lain.

Gambar 1
Stakeholders Mapping



Sumber: (Community Tools Box, 2014)

Kebijakan pembangunan wisata selalu memuat aktivitas pengembangan destinasi wisata. Cooper, Fletcher, Gilbert, Shepherd dan Wanhill merumuskan lima komponen utama pengembangan destinasi wisata yakni: (1) Objek dan Daya Tarik, (2) Aksesibilitas, (3) Amenitas atau fasilitas pendukung dan penunjang wisata, (4) *Ancillary* atau fasilitas pendukung lainnya, serta (5) Kelembagaan. (Sunaryo, 2013). Kelima komponen pengembangan destinasi wisata tersebut akan menghasilkan pembangunan wisata yang berhasil jika dikelola dengan baik.

Tatakelola pembangunan wisata yang baik, dari aspek pelibatan aktor di luar pemerintah, setidaknya harus memuat prinsip yang menggambarkan pengawasan dan kontrol, pelibatan secara aktif, kemitraan serta akomodasi aspirasi masyarakat (Sunaryo, 2013). Jika dalam kacamata produksi wisata menurut Yoeti terdapat 3 (tiga) syarat minimal destinasi yakni *something to see*, *something to do*, dan *something to buy* (Tatali, Lasabuda, Andaki, & Lagarensen, 2018), maka masyarakat lokal memiliki potensi untuk menyediakan ketiganya.

3. Metodologi Penelitian

Desa Meninting merupakan salah satu desa pesisir di Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat. Sebagai salah satu daerah berpantai di Provinsi Nusa Tenggara Barat, desa ini sangat dekat dengan aktivitas dan lokasi pariwisata di Pantai Senggigi. Desa Meninting terdiri

dari lima dusun yakni Dusun Meninting Buwuh, Dusun Kongok, Dusun Peresak, Dusun Tegal dan Dusun Pelempat. Dari lima dusun tersebut, hanya dua dusun yakni Dusun Meninting Buwuh dan Dusun Kongok yang langsung berhadapan dengan garis pantai barat Pulau Lombok. Selain itu, secara administratif desa ini sangat dekat dengan pusat keramaian ibukota provinsi. Desa Meninting dilalui oleh Kali Meninting yang bermuara di Selat Lombok memisahkan Pulau Lombok dengan Pulau Bali di sebelah baratnya. Kali Meninting menjadi batas alam Desa Meninting dengan wilayah administratif kota. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan dan penyajian data yang berbentuk peta sosial. *Social Mapping* atau pemetaan sosial bisa dijadikan sebagai metode dalam mengeksplorasi struktur sosial masyarakat terkait partisipasinya dalam kebijakan publik. Metode ini menghasilkan output riset berupa visualisasi lokasi rumah tangga dan distribusi karakteristik sosial masyarakatnya (World Bank, 2007). World Bank menyebutkan bahwa data yang bisa digambarkan oleh visualisasi tersebut antara lain layout komunitas, infrastruktur, demografi, kelompok etnolinguistik, pola kesehatan, kesejahteraan dan sebagainya. Sementara yang bisa diidentifikasi dari pemetaan sosial adalah kriteria kelompok sosial yang bersifat lokal dan mengukur distribusi sumberdaya di antara mereka. World Bank memberikan catatan bahwa *social mapping* sesuai diterapkan untuk kajian terhadap komunitas yang kecil namun akan menjadi sangat kompleks jika jumlah rumah tangga yang diteliti lebih besar.

Berbeda dengan pemetaan fisik yang biasanya diterapkan selama ini, pemetaan sosial lebih pada menyusun laporan bersama komunitas lokal (Kalaisevan & Dongre, 2012). Pemetaan sosial dapat digunakan untuk mengidentifikasi kondisi sosial budaya sebuah komunitas antara lain: (1) Nilai-nilai dominan yang dianut sehingga mampu menggerakkan masyarakat; (2) Kekuatan-kekuatan sosial yang berpotensi mengubah komunitas mereka sendiri; (3) Karakter masyarakat ketika menghadapi intervensi sosial; (4) Pola informasi dan komunikasi; dan (5) Faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi sikap dan perilaku mereka (Wiratma, 2010). Selama ini penelitian-penelitian yang menggunakan pemetaan sosial sebagai metode lebih banyak terkait dengan bidang geografis atau sains yang membutuhkan identifikasi spasial. Sementara studi di bidang sosial umumnya berakhir pada eksplorasi sosiospasial tanpa menjadikannya sebagai upaya untuk memahami posisi masyarakat dalam proses kebijakan dan merumuskannya sebagai rekomendasi kebijakan publik.

Obyek yang diteliti adalah sumberdaya komunitas nelayan di pesisir Desa Meninting yang dianggap akan menjadi basis sumberdaya untuk mempengaruhi dan dipengaruhi oleh program-program pembangunan desa yang berorientasi pada desa wisata baru selain kawasan Senggigi di Lombok Barat. Data yang dihasilkan berupa (1) Data spasial sumberdaya sosial nelayan dan (2) Kategori sosiospasial nelayan sebagai pemangku kepentingan dalam kebijakan pembangunan wisata di Desa Meninting. Selain itu dokumen pemerintah serta publik mengenai aspek sosial komunitas nelayan di pesisir Meninting digunakan untuk mendukung kegiatan triangulasi.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan (1) Observasi lingkungan spasial tempat tinggal komunitas nelayan, aspek sosial ekonomi yang dapat diindera melalui rekaman, foto atau dapat digambarkan secara naratif dan (2) Wawancara yang akan dilakukan sebagai aktivitas untuk mengidentifikasi kategori sosial komunitas nelayan terkait posisi mereka sebagai pemangku kepentingan dalam program pembangunan desa tersebut. Wawancara dilakukan terhadap informan yang dipilih secara purposif dengan kategori; (1) Keterwakilan geografis tempat tinggal, (2) Kepemilikan sumberdaya ekonomi, (3) Aspek sosial yang dibutuhkan untuk mempengaruhi kebijakan dan dimiliki untuk dikatakan berkepentingan terhadap kebijakan dan (4) Kapasitas informan dalam proses kebijakan. Selanjutnya data

disajikan dalam bentuk peta spasial yang menjelaskan sebaran dan kondisi sosial sebaran tersebut dikaitkan dengan program pembangunan desa.

Dalam mengidentifikasi sumberdaya nelayan, peneliti melakukan wawancara terhadap dua puluh tiga orang nelayan dan empat kelompok nelayan. Dua puluh tiga orang nelayan tersebut bermukim mewakili masing-masing dusun di mana mereka bertempat tinggal. Sementara empat kelompok nelayan berasal dari Dusun Meninting Buwuh, Dusun Pelempat dan Dusun Peresak. Tiap kelompok nelayan beranggotakan beragam, sepuluh hingga tigabelas orang. Ada satu kelompok nelayan yang merupakan pecahan dari kelompok yang lain. Informan ditentukan dari informasi yang dikembangkan dari penuturan masing-masing Kepala Dusun, dimana tiga orang kepala dusun juga merupakan nelayan atau pernah berprofesi sebagai nelayan. Selain itu ada informan ditemui secara insidental di pantai pada jam berlabuh dari melaut.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

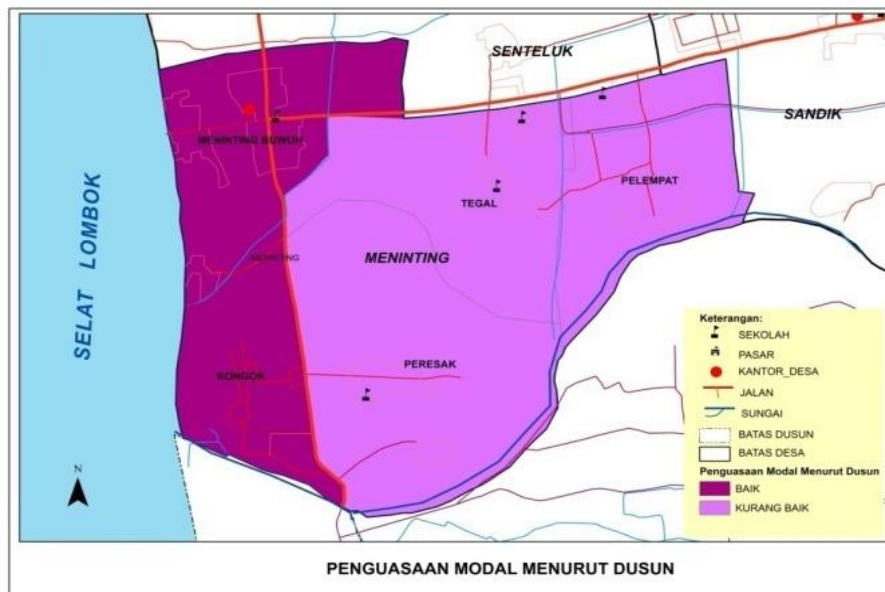
A. Sumberdaya yang dimiliki Nelayan Meninting

Pemerintah Desa Meninting tidak memiliki data profil nelayan yang rinci. Namun jumlah nelayan dan kelompok nelayan di Desa Meninting sangat fluktuatif. Dusun Tegal adalah dusun yang secara ekstrim menunjukkan tidak adanya kelompok nelayan, sekalipun di dusun tersebut terdapat masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan. Akibatnya anggota masyarakatnya terpaksa bergabung dengan kelompok nelayan di dusun lain. Dusun Meninting Buwuh adalah dusun yang memiliki jumlah kelompok nelayan terbanyak. Dusun ini terletak di wilayah yang langsung berbatasan dengan pantai. Aktivitas perekonomian masyarakat secara khas berkaitan dengan bahari. Pada saat penelitian ini dilakukan, informan pada dusun ini dapat saling menyebutkan kelompok lainnya hingga data yang tercatat adalah empat kelompok. Ada beberapa penyebab fluktuasi jumlah kelompok nelayan: (1) Kemampuan memodali kegiatan melaut, (2) Harapan jangka panjang terhadap pekerjaan nelayan, (3) Alasan pragmatis sekedar untuk mendapatkan dana atau materi bantuan tertentu, dan ketika dana atau bantuan sudah diperoleh kemudian kelompok tersebut bertukar formasi anggota atau bahkan berhenti berkegiatan, serta (4) Konflik antar anggota.

Berkaitan dengan harapan jangka panjang terhadap pekerjaan nelayan, karakteristik penggunaan lahan pada dusun ini yang sudah minim areal persawahan atau perkebunan, menjadikan keterikatan penduduknya terhadap pekerjaan nelayan lebih tinggi. Pekerjaan nelayan dan tempat tinggal di pesisir Meninting yang diwariskan oleh orangtua menjadikan kepentingan terhadap laut terlihat sangat jelas.

Sumberdaya sosial yang dimiliki oleh nelayan di Desa Meninting beragam menurut bentuk dan nilainya terkait dengan kebijakan pembangunan di desa. Peta sosial penguasaan modal oleh nelayan Meninting pada Gambar 2 menunjukkan bagaimana nelayan yang bermukim di pesisir, yakni Dusun Meninting Buwuh dan Dusun Kongok, memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Hal ini ditunjukkan dengan pengalaman mengakses bantuan modal dari lembaga keuangan bukan bank seperti koperasi. Selain itu, terdapat pengepul ikan yang memiliki kapasitas permodalan individu yang cukup dikenal oleh nelayan seperti di Dusun Kongok. Sementara itu, tiga dusun lainnya belum memiliki akses permodalan yang memadai dan hanya bergantung pada sistem dukungan internal kelompok, atau memilih untuk tidak melaut sementara waktu, bahkan berhenti menjadi nelayan.

Gambar 2
Peta Sosial Penguasaan Modal oleh Nelayan Menurut Dusun



Sumber: (Data Primer, 2019)

Selain itu, informan menggambarkan bahwa sebuah rumah tangga nelayan dapat menjadi nelayan pemilik (lapisan menengah) ketika ia terlibat langsung dalam aktivitas produksi penangkapan ikan sekaligus pemodal (lapisan atas) ketika ia menjadi pengepul. Tidak ada data yang menunjukkan bahwa nelayan buruh (lapisan bawah) di Meninting dapat mencapai lapisan menengah dan atas, melainkan sebaliknya menemui resiko berhenti sama sekali melaut ketika ketiadaan modal dihadapi bersamaan dengan musim tangkapan ikan yang menurun. Tiga orang informan yang menyebutkan alasan berhenti melaut adalah ketiadaan modal harian yang sedikitnya 75 ribu rupiah untuk pembelian bahan bakar perahu, sementara hasil penjualan tangkapan tidak menutupi modal bahkan bisa saja tidak membawa hasil sama sekali. Itupun ketika mereka tergabung dalam kelompok nelayan yang bisa menggunakan perahu milik kelompok. Lain halnya dengan buruh nelayan yang tidak tergabung dalam kelompok yang tentu saja bekerja tergantung dari pemilik perahu.

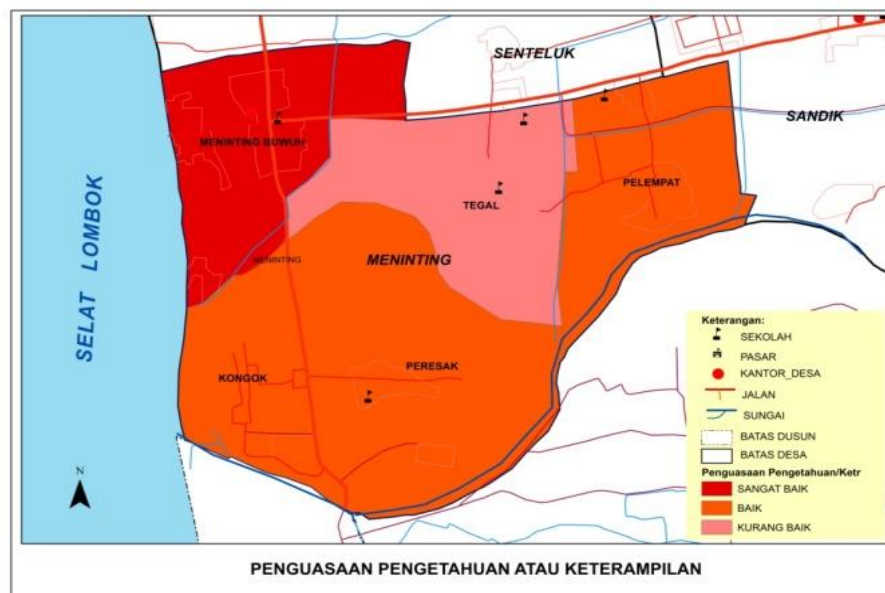
Nelayan yang bermukim di kedua dusun yang langsung berhadapan dengan laut dengan demikian menunjukkan kapasitas permodalan yang baik. Kepentingan yang tinggi terhadap nilai ekonomi bahari dimana rumah-rumah mereka berhadapan langsung dengan laut ditunjukkan dengan konsistensi pekerjaan sebagai nelayan dan perilaku mempertahankan aktivitas ekonomi melalui permodalan.

Pekerjaan sebagai nelayan membutuhkan proses pembelajaran. Nelayan Meninting menceritakan bahwa pengetahuan dan keterampilan yang mereka gunakan untuk melaut dan menghasilkan tangkapan yang memuaskan berasal dari (1) Warisan orangtua atau leluhur, atas dasar garis keturunan atau kesukuan di mana latar belakang pembelajaran sosial dalam komunitas suku sangat kuat, misalnya Suku Bugis, yang spesifik mendiami Dusun Meninting Buwuh di pesisir Meninting (2) Otodidak, di mana kegiatan melaut oleh nelayan kategori ini diperoleh dari pembelajaran dalam kelompok nelayan seperti nelayan di Dusun Pelempat, Tegal dan Peresak, (3) Lembaga formal lainnya seperti melalui pelatihan dan pendampingan yang diberikan oleh pemerintah sehingga keterampilan dan wawasan nelayan mengenai laut meningkat. Dalam sebaran nelayan menurut penguasaan pengetahuan dan keterampilan

sebagaimana ditampilkan pada peta Gambar 3, tidak bisa dipungkiri munculnya informasi yang terkait dengan komparasi sosio-spasial menurut suku bangsa.

Gambar 3

Peta Sosial Penguasaan Pengetahuan atau Keterampilan oleh Nelayan Menurut Dusun



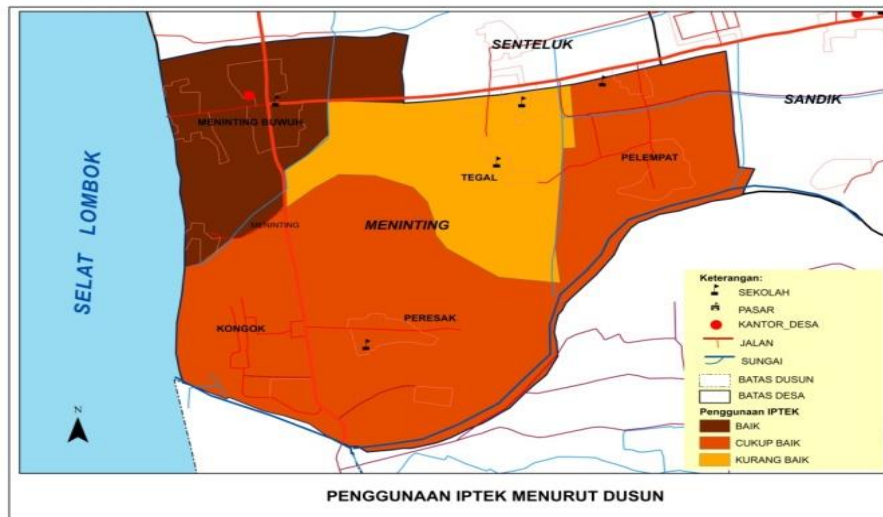
Sumber: (Data Primer, 2019)

Nelayan di Dusun Meninting Buwuh, sebagai nelayan sukses yang dicontohkan oleh masyarakat, merupakan keturunan Bugis yang menguasai pengetahuan atau keterampilan yang sangat baik. Informan menjelaskan bahwa berhadapan dengan laut sejak lahir, mewariskan kepada mereka pengetahuan tentang arah mata angin dan prediksi mengenai jenis dan jumlah ikan yang dapat ditangkap. Begitupula pengetahuan mengenai arus laut yang sudah disampaikan secara turun temurun dalam keluarga nelayan dimana mereka lahir dan tumbuh. Dengan begitu mereka mampu secara efektif dan efisien mengarahkan sumberdaya dalam menangkap ikan menurut musim tertentu.

Penggunaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) oleh nelayan sebagai penunjang kegiatan mencari ikan, sangat terkait dengan penguasaan pengetahuan dan keterampilan. Penggunaan alat komunikasi modern seperti telepon genggam dan penggunaan analisis berdasarkan pengetahuan seperti pemahaman terhadap jenis musim dan angin yang menentukan jumlah ikan dan sebagainya, bervariasi antara nelayan satu dusun dengan dusun lainnya. Beberapa nelayan yang menjadi informan bahkan tidak mampu baca tulis dan sulit untuk ditemukan di pantai pada saat mereka berlabuh seperti biasanya. Salah satu cara yang biasa mereka lakukan adalah dengan saling mencari keberadaan perahu sesama nelayan atau kelompok yang lain. Beberapa di antara mereka masih berjalan kaki dari rumah menuju pantai ketimbang kendaraan bermotor. Nelayan pemodal secara sosial menguasai dan menggunakan IPTEK dengan baik, sementara nelayan buruh dan pemilik, hanya menguasai sebagian IPTEK yang dibutuhkan untuk mendukung aktivitas melaut atau meningkatkan kesejahteraannya. Sebagian nelayan bahkan tidak menggunakan IPTEK sama sekali karena ketiadaan kepemilikan. Gambar 4 menunjukkan bagaimana perbedaan penggunaan IPTEK dalam kegiatan produksi nelayan setiap dusun tersebut.

Keberadaan nelayan yang relatif konsisten melaut di Dusun Meninting Buwuh, selain terkait dengan sumberdaya relasi ekonomi politik nelayan di dusun ini, mendukung bagi masuknya IPTEK yang terkait dengan aktivitas penangkapan ikan. *Knowledge sharing* yang mereka peroleh berasal dari latarbelakang ruang hidup yang langsung berbatasan dengan laut yang mengkondisikan mereka untuk mendapatkan ilmu baru terkait menangkap ikan maupun asistensi yang diperoleh dari lembaga luar berupa pelatihan.

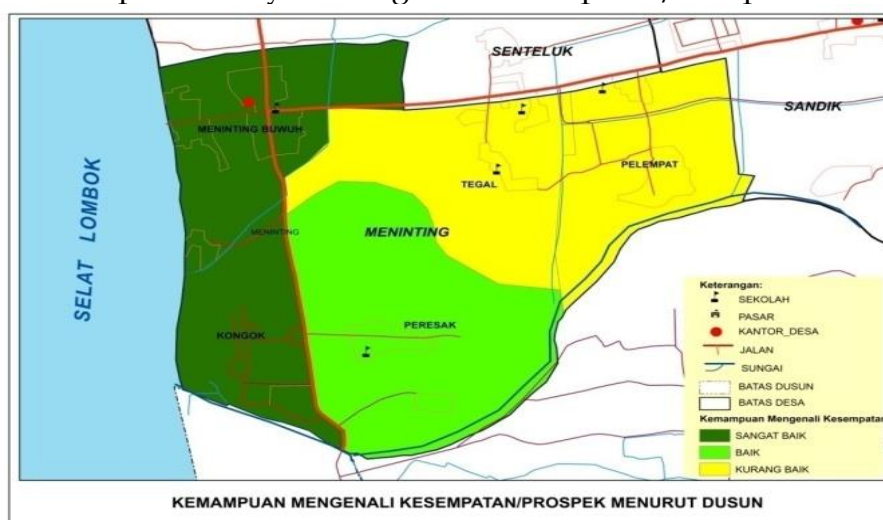
Gambar 4
Peta Sosial Penggunaan IPTEK oleh Nelayan Menurut Dusun



Sumber: (Data Primer, 2019)

Tidak semua nelayan di kelima dusun yang mengenali atau dapat menangkap kesempatan ekonomi dari pengembangan sektor pariwisata di desa mereka. Hanya nelayan di kedua dusun yang langsung berbatasan dengan garis pantai, yakni Dusun Kongkok dan Dusun Meninting Buwuh, yang memiliki visi mengenai kesempatan ekonomi dari pariwisata terhadap profesi mereka seperti pada Gambar 5.

Gambar 5
Peta Sosial Kemampuan Nelayan Mengenali Kesempatan/Prospek Menurut Dusun



Sumber: (Data Primer, 2019)

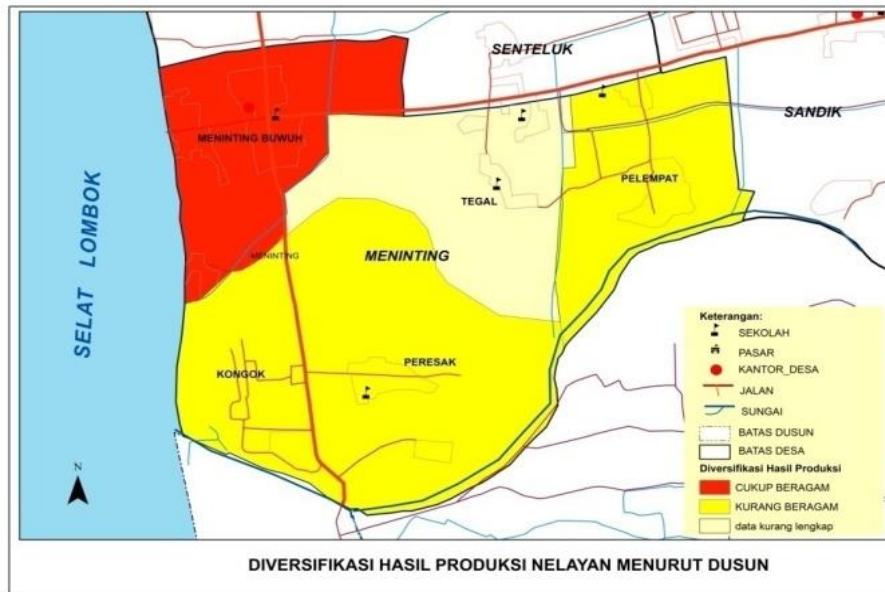
Nelayan di dusun pesisir lebih mengenali adanya kesempatan ekonomi wisata karena kedua dusun ini yang langsung bersentuhan dengan rencana pengembangan obyek wisata, terutama kuliner ataupun wisata olahraga dan alam, baik yang dibiayai oleh desa, maupun negara dan pemerintah kabupaten. Bahkan masyarakat di Dusun Kongok sejak tahun 2017 sudah disosialisasikan mengenai rencana pengembangan pemukiman mereka menjadi obyek wisata muara yang menurut tokoh setempat akan meniru obyek wisata perahu ala Venesia di Italia. Namun sayangnya, nelayan dan kelompok pengolahan yang umumnya beranggotakan perempuan dalam rumah tangga nelayan belum memutuskan bentuk respon mereka terhadap kesempatan tersebut. Beberapa alasan yang dikemukakan adalah ketiadaan keahlian pengolahan produk, ketiadaan modal untuk memproduksi ragam produk hasil tangkap dan keengganan untuk berspekulasi atau faktor kepuasan dengan kondisi ekonomi mereka saat ini. Dalam mengenali kesempatan ekonomi, sekalipun nelayan pemilik mempunyai sumberdaya untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi wisata, kelompok nelayan ini tidak serta merta mengenali adanya kesempatan atau mengambil kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan. Keengganan untuk mencoba melakukan aktivitas usaha yang baru di luar yang biasa mereka lakukan, menjadi alasan utama.

Dari sisi diversifikasi produksi nelayan, ditemukan bahwa hanya satu dusun yang memiliki pengolah hasil tangkapan, baik dalam kelompok perempuan maupun perorangan atau rumah tangga nelayan, yang melakukan proses produksi ke dalam produk yang variatif seperti digambarkan pada peta Gambar 6. Dusun Meninting Buwuh memiliki kelompok yang memproduksi hasil tangkapan dengan perebusan (pemindangan) dan pengasapan (pemanggang). Sementara di dusun lainnya teridentifikasi proses produksinya hanya berupa pemindangan (seperti di Dusun Kongok dimana mayoritas nelayannya mengkhususkan jenis ikan yang ditangkap berupa Tongkol) atau bahkan dijual segar tanpa proses penambahan nilai ekonomis pada hasil tangkapan mereka.

Lokasi Dusun Meninting Buwuh yang terletak persis di pantai yang menjadi obyek wisata Pantai Montong, mendukung diversifikasi produk hasil tangkapan. Di dusun ini, sangat mudah menemukan lapak ikan asap atau bakar yang dijual oleh ibu-ibu nelayan pada pagi dan sore hari. Dusun ini terbuka dikarenakan adanya akses jalan yang baik dan ditunjang dengan jalan rabatan di sepanjang pesisir pantai. Sementara di Dusun Kongok yang juga berbatasan dengan pantai, tidak dijumpai penjual ikan asap atau bakar selain sentra produksi pemindangan ikan. Dusun Kongok tidak memiliki akses jalan umum yang memadai dan pesisir yang belum dikelola sehingga menyuguhkan pemandangan yang menarik karena di ujung jalan masuk dusun pengunjung hanya akan menemukan areal buntu berupa pondok nelayan dan lokasi tambatan perahu. Lagipula di Dusun Kongok, nelayan mengkhususkan diri pada hasil tangkapan berupa ikan tongkol.

Nelayan buruh dengan kapasitas produksi yang rendah, sebagian besar menjual hasil tangkapan mereka dalam kondisi segar kepada pengepul. Sementara nelayan pemilik dan nelayan pemodal, memiliki kemampuan diversifikasi lebih lanjut dalam bentuk ikan pindang maupun bakar, sekalipun ada nelayan pengepul yang juga menjual hasil tangkapan dalam kondisi segar.

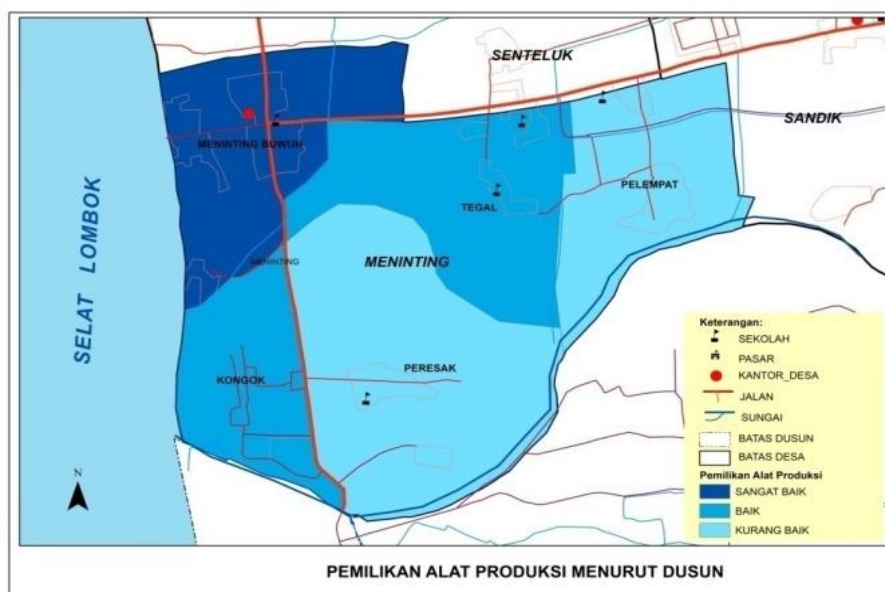
Gambar 6
Peta Sosial Diversifikasi Hasil Produksi Nelayan Menurut Dusun



Sumber: (Data Primer, 2019)

Kepemilikan alat produksi oleh nelayan di Desa Meninting terdistribusi beragam. Dari hasil identifikasi berupa observasi dan wawancara di lapangan, nelayan yang bertempat tinggal di Dusun Meninting Buwuh memiliki alat produksi baik berupa perahu maupun alat tangkap yang beragam yang terdiri dari perahu dengan berbagai ukuran dan jenis ikan yang dapat ditangkap oleh alat tersebut. Sementara itu, nelayan di Dusun Peresak dan Pelempat lebih banyak berstatus buruh nelayan atau tidak memiliki perahu dan alat tangkap sehingga lebih sering diidentifikasi sebagai nelayan buruh yang musiman bahkan berhenti melaut dikarenakan ketiadaan alat. Hal tersebut seperti dipetakan pada Gambar 7.

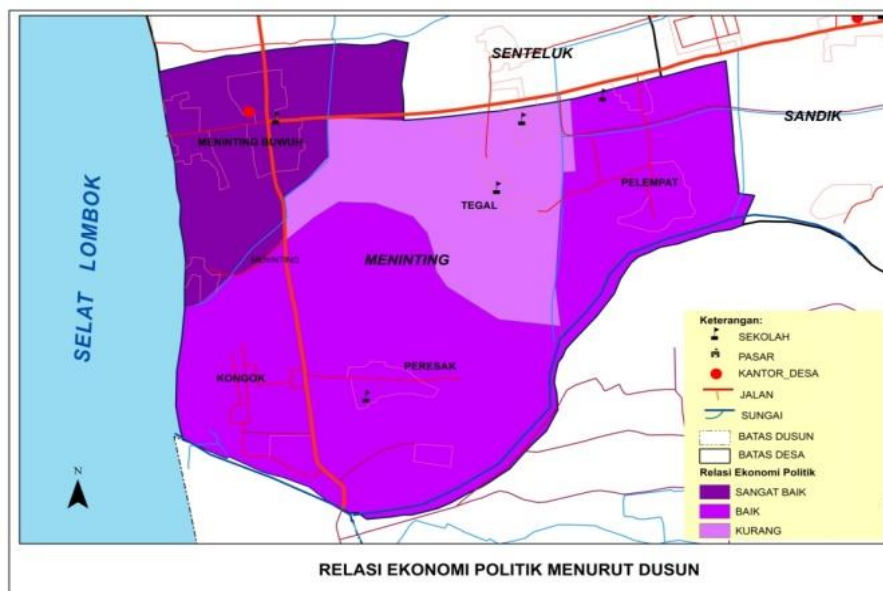
Gambar 7
Peta Sosial Pemilikan Alat Produksi Menurut Dusun



Sumber: (Data Primer, 2019)

Dalam konteks sistem kebijakan, karakteristik pola relasi ekonomi-politik sebuah kelompok sangatlah penting. Interaksi permodalan, penggunaan alat produksi, perdagangan hasil tangkap dan produksi, serta komunikasi dan akses terhadap kebijakan pemerintah setempat hingga pemerintah pusat di Desa Meninting cukup distributif. Dusun yang teridentifikasi tidak memiliki kelompok nelayan yakni di Dusun Tegal, di mana nelayan yang bermukim di dusun ini bahkan terpaksa bergabung dalam kelompok nelayan di dusun lain agar tidak sulit untuk memperoleh akses permodalan yang besar seperti lembaga keuangan atau program pemerintah. Sementara keberadaan tokoh nelayan maupun tokoh politik di dusun lainnya terutama di Dusun Meninting Buwuh dan Dusun Pelempat, memberikan kesempatan bagi nelayan dan kelompoknya untuk dapat mengakses sumber daya yang disediakan oleh pemerintah dan lembaga keuangan seperti bantuan perahu, alat tangkap atau modal keuangan, termasuk kesempatan untuk berkontribusi dalam program kerja pemerintah Desa Meninting. Hal tersebut dipetakan seperti pada Gambar 8.

Gambar 8
Peta Sosial Relasi Ekonomi Politik Nelayan Menurut Dusun



Sumber: (Data Primer, 2019)

Dari segi bentuk organisasi sosial dan politik yang diikuti oleh nelayan di dusun-dusun tersebut juga beragam. Namun hampir seluruh nelayan informan mengakui dan menggambarkan pola keikutsertaan nelayan di wilayah mereka dalam organisasi sosial-politik sangatlah jarang. Beberapa informan hanya menyebut perkumpulan pengajian di musala di lingkungan mereka selain kelompok nelayan yang mereka bentuk sendiri, sekalipun hanya akan beraktivitas pada saat ada program bantuan dari pemerintah saja. Hanya satu orang informan yang menjelaskan aktivitas komunikasi dan lobi politik yang dilakukan terhadap pemerintah maupun tokoh legislator dalam rangka memberdayakan dirinya, kelompoknya dan relasinya dengan nelayan di dusun lain. Organisasi sosial yang mereka bentuk berupa kelompok nelayan tidak memiliki kapasitas kelembagaan yang memadai untuk berhadapan dengan sistem kebijakan. Ikatan kepentingan yang lemah dan jangka pendek dalam organisasi kelompok nelayan menyebabkan organisasi ini rentan berhenti paska mendapatkan bantuan.

Ini sekaligus menjadi persoalan bagi pemerintah desa dalam melibatkan kelompok nelayan dalam proses kebijakan pembangunan.

B. Nelayan Meninting melihat Potensi Wisata Pesisir

Pesisir Meninting berlokasi persis di sisi barat pintu masuk kawasan wisata Pantai Senggigi. Bagi pengunjung luar, pantai ini seakan ditutupi oleh barisan padat rumah nelayan yang bisa diakses oleh sebuah jalan tanpa plang nama kawasan obyek pantai. Oleh karenanya, potensi wisata kawasan pantai Meninting semula hanya dinikmati oleh warga lokal.

Lokasi pantai Meninting yang paling ramai dikunjungi terletak di Dusun Meninting Buwuh. Lokasi ini dikenal dengan sebutan Pantai Montong. Setiap hari Minggu selepas sholat subuh, lokasi ini akan padat oleh remaja dan keluarga yang menikmati pemandangan pantai barat yang belum terkena sinar matahari sehingga menyuguhkan pemandangan laut dan langit yang indah, ditambah dengan deburan ombak yang tidak begitu besar dan dijadikan tempat bagi keluarga untuk berekreasi. Kegiatan rekreasi yang dilakukan pengunjung di pantai ini belum begitu beragam. Umumnya hanya menikmati pemandangan pantai dengan duduk-duduk di pinggir pantai dan sesekali berenang. Pada hari minggu, akan lebih banyak diisi dengan kegiatan berjalan atau berlari pagi karena badan jalan sepanjang pinggirnya telah dirabat ulang oleh pemerintah Desa Meninting.

Sekalipun pantai ini belum menyediakan sistem sanitasi yang layak diantaranya tidak tersedianya toilet umum dan pasir yang dipenuhi sampah, pantai ini tidak pernah sepi oleh pengunjung terutama pada akhir pekan. Terkecuali jika gelombang pasang sedang melanda pantai barat Pulau Lombok.

Pantai Montong mulai merasakan dampak ekonomi dari kegiatan wisata Pantai Tanjung Bias di Desa Senteluk yang telah dikelola dengan lebih baik dan dijadikan obyek wisata, yang mulai dikenal luas di sekitar Senggigi. Saat ini telah berdiri beberapa warung makanan laut yang dikelola lebih baik oleh warga lokal di Pantai Montong. Warung-warung ini menyediakan fasilitas yang lebih lengkap seperti toilet dan musala berikut tempat berfoto yang menarik. Namun demikian, pengunjung masih harus membiasakan diri dengan banyaknya sampah dan pola hidup masyarakat lokal yang belum sadar akan nilai ekonomi wisata. Sesekali pengunjung terpaksa menyaksikan warga yang membuang sampah ke laut. Nihilnya fasilitas kebersihan terkait sampah dan kotornya garis pantai Montong menunjukkan bahwa memang pantai ini belum dipersiapkan untuk menjadi obyek wisata yang dikelola secara profesional.

Sementara itu pemerintah desa sudah mulai melakukan sosialisasi mengenai obyek pantai melalui media massa dan media lainnya seperti baliho di depan kantor desa untuk acara tahunan yang bernilai rekreatif. Sementara di lokasi pantai, hanya ada aktivitas pemungutan retribusi bagi kendaraan bermotor saja yang dikelola oleh pemuda Dusun Meninting Buwuh.

Pemerintah desa belum mengundang investor luar untuk ikut mengelola objek wisata yang mereka miliki dikarenakan masih ada sejumlah masalah terkait spasial yang harus diperjelas sebelum sumberdaya desa dikerahkan untuk pengembangan objek wisata di kawasan tersebut. Beberapa persoalan tersebut seperti: (1) Kejelasan kepemilikan sejumlah luas bidang tanah di pinggir pantai yang melibatkan warga luar, (2) Belum disepakatinya konsep pengelolaan muara Meninting sebagai obyek wisata, dan (3) Belum jelasnya pola kontribusi warung kuliner yang telah berdiri di pinggir pantai yang dikelola oleh beberapa keluarga nelayan.

Nelayan Meninting hidup di tengah geliat aktivitas wisata pesisir. Bahkan desa tetangga mereka pada tahun 2019 diresmikan oleh pemerintah pusat sebagai salah satu destinasi wisata pesisir dengan konsep kampung nelayan yakni Pantai Tanjung Bias. Namun demikian, tidak ada informan yang memiliki perspektif tentang kesempatan dari berkembangnya destinasi

wisata Pantai Tanjung Bias. Bahkan seorang informan yang merupakan nelayan besar dan sekaligus perangkat desa, memandang bahwa perkembangan wisata Tanjung Bias tidak banyak menguntungkan nelayan di sekitarnya. Padahal Pantai Tanjung Bias hanya bisa diakses oleh kendaraan bermotor roda empat melalui Dusun Meninting Buwuh. Artinya Desa Meninting menjadi pintu masuk destinasi wisata yang semakin strategis saat ini. Namun peluang kesejahteraan yang bisa ditangkap nelayan Meninting belum sepenuhnya direspon. Beberapa penyebabnya adalah: (1) Rendahnya kapasitas sumberdaya nelayan dalam memproduksi produk wisata (2) Rendahnya kapasitas sumberdaya nelayan dalam mempengaruhi atau menentukan arah pengembangan destinasi wisata Meninting, dan (3) Belum konkretnya konsep pengembangan wisata Meninting yang melibatkan kelompok nelayan tempatan.

Jika dicermati, nelayan Meninting saat ini berada diluar proses kebijakan pembangunan destinasi wisata. Hal ini dikarenakan sumberdaya dan aktivitas produksi mereka secara nyata masih kurang bagi keterlibatan mereka dalam kegiatan pariwisata yang mulai berkembang di sana. Namun demikian, aktivitas pariwisata pesisir belum menampakkan kerugian bagi perekonomian mereka. Untuk dapat dilibatkan atau melibatkan diri dalam pembangunan wisata pesisir Meninting, kapasitas sumberdaya nelayan membutuhkan alat ungkit melalui sejumlah rekayasa sosial. Kelompok nelayan menjadi pihak yang potensial sebagai pihak penerima investasi atau lebih baik lagi menjadi pelaku dalam produksi pariwisata di Meninting.

Sementara kesiapan nelayan Meninting terlibat dalam pengembangan destinasi wisata pesisir menurut aspek *something to see, something to do* dan *something to buy* (sesuatu untuk dilihat, dilakukan dan dibeli) masih pada kesiapan paling dasar. Nelayan-nelayan yang bermukim di dusun-dusun yang menghadap laut hanya sedikit yang dapat menyebutkan berkah kesejahteraan yang bisa mereka ambil dari pembangunan wisata pesisir sekalipun mereka dapat menyaksikan arus kunjungan wisatawan setiap hari dari rumah-rumah mereka. Nelayan Meninting, dengan potret kehidupan dan pekerjaan mereka, sekadar mampu menyuguhkan pengalaman wisatawan tentang aktivitas melaut sehari-hari, mencoba pengalaman menangkap ikan secara sederhana dari pantai atau sekedar membeli ikan segar ataupun olahan sederhana seperti ikan pindang atau ikan bakar.

Informan yang memiliki sumberdaya yang paling besar menjelaskan bahwa konsep pembangunan kawasan wisata yang sudah disepakati oleh Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Kota Mataram dan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat di wilayah muara Kali Meninting serta rencana pengembangan destinasi wisata selancar, tidak mencerminkan penempatan nelayan sebagai salah satu aktor utama. Pembangunan tersebut lebih banyak membutuhkan investor non nelayan dengan modal yang tidak dimiliki oleh nelayan Meninting saat ini. Sementara aspek kelembagaan yang dibutuhkan untuk membangun destinasi wisata pesisir yang melibatkan nelayan belum dipenuhi oleh pemerintah desa dikarenakan dasar untuk membentuk lembaga yang berasal dari data nelayan dan kelompok nelayan belum tersedia.

C. Aksesibilitas Nelayan Meninting terhadap Kebijakan Pembangunan Wisata Pesisir

Nelayan Meninting dalam konteks kebijakan pengembangan destinasi wisata pesisir merupakan kelompok kepentingan yang strategis bagi pemerintah desa. Dari aspek geografis spasial, lokasi wisata pesisir bersentuhan langsung dengan ruang hidup nelayan dimana mereka melakukan aktivitas sehari-hari berinteraksi dengan masyarakat dan laut. Dari aspek sosial-ekonomi, kelompok nelayan memiliki potensi sebagai produsen produk ataupun jasa wisata. Aksesibilitas nelayan terhadap kebijakan pengembangan wisata di Meninting akan

menentukan bagaimana konsep destinasi wisata yang dikembangkan oleh pemerintah desa dan seberapa sukses aktor kunci kebijakan mencapai tujuannya.

Jika dicermati, nelayan Meninting saat ini masih belum mencapai tingkatan sebagai *promoters*. Hal ini dikarenakan sumberdaya yang dimiliki dan pengaruh kelompok nelayan terhadap sistem kebijakan desa, masih belum memadai. Nelayan pemilik dan nelayan pemodal lebih tepat digambarkan sebagai kelompok *defenders*, terutama yang bertempat tinggal di areal pantai. Hal ini mengingat kelompok nelayan belum menjadi kelompok yang solid dikarenakan sering berubahnya formasi keanggotaan dan sebagian besar kelompok membubarkan diri ketika sudah mendapatkan modal dari pemerintah. Sebagian nelayan pemilik dan pemodal juga merupakan pemangku kepentingan yang bersifat *latents*. Beberapa informan menunjukkan bagaimana interaksi kepentingan mereka terhadap pemerintah desa dalam konteks kebijakan pengembangan destinasi wisata yang belum intens dalam mendesak atau minimal menyampaikan gagasan mereka, sekalipun informan-informan tersebut merupakan tokoh masyarakat yang termasuk dalam struktur pemerintahan desa seperti kepala dusun dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) disamping menjadi nelayan.

Lain halnya dengan nelayan buruh, secara khusus kategori ini sangat identik dengan kategori pemangku kepentingan yang *apathetic*. Fleksibilitas pekerjaan mereka melaut, sehingga kelompok ini digambarkan sebagai mereka yang seringkali musiman atau bahkan dengan sangat mudah berhenti menjadi nelayan atau berpindah pekerjaan, menjadikan kepentingan mereka tidak kuat terhadap kemungkinan mereka mendapatkan manfaat dari kebijakan pembangunan wisata sekalipun kebijakan tersebut berada di wilayah hidup mereka di pesisir dan terkait dengan pekerjaan serta interaksi mereka dengan laut. Nelayan dengan karakteristik ini umumnya bermukim di dusun yang tidak langsung berhadapan dengan laut dan masih memiliki sumberdaya alam lainnya berupa sawah dan perkebunan.

Demikian pula dengan kurangnya sumberdaya pengetahuan, kemampuan penggunaan teknologi, kepemilikan modal dan sebagainya menyulitkan mereka untuk memiliki pengaruh sosial dan politik secara langsung terhadap kebijakan pemerintah desa.

Aksesibilitas nelayan selaku pemangku kepentingan terhadap kebijakan pengembangan destinasi wisata juga dapat digambarkan dengan beberapa aspek. Dari aspek kepentingan pribadi setiap nelayan, tidak diperoleh gambaran yang konkret mengenai gagasan nelayan yang mewakili keinginan mereka terhadap pengembangan destinasi wisata pesisir, sekalipun yang bermukim di dusun pinggir laut. Sementara dari aspek pengetahuan tentang isu kebijakan, sebagian besar nelayan tidak mengetahui adanya agenda kebijakan pengembangan destinasi wisata pesisir, kecuali nelayan yang kebetulan tokoh masyarakat atau aparatur pemerintah desa yang memiliki akses politik langsung kepada pemerintah. Dari sisi sumberdaya, nelayan Meninting masih sangat terbatas secara sosial ekonomi. Nelayan pemilik dan pemodal hanya lima orang yang bisa disebutkan oleh informan. Itupun ada nelayan pemodal yang dalam perkembangan terakhir mengakui bahwa dirinya terpaksa menjual kapal bantuan dari KKP dikarenakan tidak sesuai spesifikasinya dengan kondisi arus laut tempat menangkap ikan, sementara selebihnya adalah nelayan buruh. Dari aspek kemampuan mengerahkan sumberdaya, hanya nelayan pemilik dan atau pemodal yang kebetulan adalah tokoh atau menjadi aparat pemerintah desa saja yang dapat menyebutkan bagaimana aktivitas mereka menyampaikan atau mendesak gagasan dan kepentingan nelayan. Kelompok ini menggambarkan bagaimana mereka menjadi agen bagi nelayan buruh dalam mengakses kebijakan. Dalam hal posisi terhadap isu kebijakan pengembangan wisata pesisir, nelayan pemilik dan pemodal menunjukkan reaksi mendukung atau netral. Hal ini dikarenakan belum begitu konkretnya konsep destinasi wisata yang diagendakan oleh pemerintah desa. Sementara

nelayan buruh cenderung menunjukkan posisi netral dikarenakan belum mendapatkan informasi dengan baik mengenai agenda kebijakan tersebut. Tidak ditemukan penolakan terhadap agenda kebijakan tersebut, baik dari nelayan pemodal, pemilik, maupun nelayan buruh.

5. Kesimpulan

Komunitas nelayan yang tinggal di Desa Meninting tersebar di lima dusun yakni Dusun Meninting Buwuh, Dusun Kongok, Dusun Peresak, Dusun Tegal dan Dusun Pelempat. Namun demikian, sebaran kepemilikan sumberdaya sosial ekonomi nelayan di masing-masing dusun untuk mengakses sumberdaya kebijakan pembangunan wisata di Desa Meninting, tidak merata. Persoalan penguasaan modal, pengetahuan dan keterampilan, pemilikan alat produksi, penggunaan IPTEK, pengenalan terhadap kesempatan ekonomi dari pariwisata, relasi sosial politik nelayan serta diversifikasi produksi hasil tangkapan berbeda di masing-masing dusun. Nelayan-nelayan yang bertempat tinggal di dusun pesisir memiliki sumberdaya sosial yang lebih baik dibandingkan nelayan-nelayan yang berjauhan dari pantai. Dengan demikian, latar keruangan ini membedakan persepsi dan gagasan mereka terhadap pembangunan wisata pesisir dibandingkan dengan nelayan-nelayan pada dusun lain. Aksesibilitas kelompok nelayan terbatas dalam kebijakan pembangunan tersebut. Nelayan-nelayan yang berhadapan langsung dengan laut memiliki kepentingan yang lebih kuat terhadap aktivitas ekonomi bahari. Namun sumberdaya sosial yang dimiliki belum cukup untuk menentukan konsep pembangunan wisata pesisir yang menguntungkan mereka. Nelayan Meninting masih dominan menunjukkan sebagai *defenders*, *latents* atau bahkan *apathetic*. Nelayan Meninting belum mencapai posisi *promoters* dalam program pembangunan wisata di desanya dikarenakan belum menunjukkan adanya keberhasilan dalam menentukan atau mewarnai program pengembangan yang dirumuskan pemerintah desa selama ini.

Penelitian ini merekomendasikan sejumlah saran operasional. Bagi masyarakat akademik, khususnya peneliti, kajian mengenai karakteristik masyarakat di wilayah tertentu perlu disandingkan dengan kajian spasial dikarenakan adanya respon sosial yang berlatarbelakang lingkungan spasial tertentu. Dengan demikian pemetaan sosial dapat memberikan pemahaman tentang keterkaitan aspek kewilayahan dengan corak sosial tertentu. Sementara bagi Pemerintah Desa Meninting perlu membangun kapasitas kelembagaan kelompok nelayan sehingga ada ikatan kepentingan jangka panjang dalam pembangunan desa dan Pemerintah Desa Meninting dapat melakukan rekayasa kebijakan yang tepat dan efektif melalui (1) Identifikasi dan kategorisasi kapasitas kelompok nelayan, (2) Program pembinaan antar kelompok dimana kelompok nelayan dengan kapasitas yang baik di areal pesisir melakukan aktivitas asah dan asuh terhadap kelompok nelayan dengan kapasitas kurang di dusun yang berjauhan dengan pantai, (3) Rekayasa kelembagaan dengan menjadikan kelompok nelayan sekaligus sebagai Kelompok Sadar Wisata, terutama nelayan-nelayan yang berdiam di pinggir pantai yang secara rutin berinteraksi dengan aktivitas kunjungan wisata pantai (4) Menjajaki kemitraan kelompok nelayan antar desa wisata pesisir untuk memperkuat kapasitas sumberdaya nelayan sebagai kelompok kepentingan dalam kebijakan pembangunan wisata di Desa Meninting dan (5) Meningkatkan sumberdaya ekonomi-sosial nelayan. Selain dari sisi kapasitas sumberdaya nelayan tersebut, Pemerintah Desa Meninting di masa yang akan datang perlu merumuskan program wisata pesisir Meninting yang konkret dan bersumber dari kelebihan atau kekuatan aspek sosial-ekonomi kehidupan nelayan di wilayah desa ini.

6. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan pendanaan penelitian oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi melalui Hibah Penelitian Dosen Pemula yang dikelola oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat pada tahun pelaksanaan 2019 (112/SP2H/PPM/DRPM/I/2019, 0838/L8/KM/2019), serta dukungan informasi dari Pemerintah Desa Meninting dan Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta para informan.

Daftar Pustaka

- Alemie, B. K., Bennett, R. M., & Zevenbergen, J. (2015). A socio-spatial methodology for evaluating urban land governance: the case of informal settlements. *Journal of Spatial Science*, 60(2), 289-309.
- Badan Pusat Statistik. (2012). *Jumlah Lapangan Kerja Kepala Rumah Tangga 30 Persen Termiskin Indonesia per Juli 2012*.
- Batulayar News. (2016, 02 17). *Penempatan Tenaga Kerja Asing di Daerah Wisata*. Retrieved 08 17, 2019, from <http://batulayarnews.blogspot.com/2016/02/penempatan-tenaga-kerja-asing-di-daerah.html#more>.
- Community Tools Box, Center for Community Health and Development at the University of Kansas. *Section 8. Identifying and Analyzing Stakeholders and Their Interests*. Retrieved 09 02, 2019 from <https://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/participation/encouraging-involvement/identify-stakeholders/checklist>.
- Dunn, W. N. (2000). *Public Policy Analysis: An Introduction*. Third Edition. New Jersey: Prentice Hall.
- Fitriyah, K., & Widodo, D. (2016). Karakteristik Sosial Budaya Dan Ekonomi Nelayan Kecil Di Wilayah Pesisir Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember. *Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi dan Ilmu Sosial*, 10(1).
- Forster, R., & Osterhaus, J. (2011). *Target Group Analysis: What for, When, What and How?*. Retrieved 08 22, 2018 from <http://www.mekonginfo.org/assets/midocs/0001933-society-target-group-analysis-what-for-when-what-and-how.pdf>.
- Haryani, H. (2014). Potensi Pengembangan Atraksi Wisata Kampung Nelayan Pasie Nan Tigo Kota Padang Ditengah Ancaman Bencana Abrasi Dan Banjir. *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 30(2), 189-198.
- Haryani; H., & Huda, N. (2016, October). *Potensi Pengembangan Wisata Kampung Nelayan Dengan Partisipasi Masyarakat Sebagai Destinasi Wisata Baru*. National Conference of Applied Sciences, Engineering, Business and Information Technology. Politeknik Negeri Padang (pp. 167-176). ASCNI-Tech.
- Herison, A., Romdania, Y., & Yosua, W. B. (2018). Analisis Zonasi Ekowisata Bahari Berbasis Sistem Informasi Geografis. *Jurnal SPATIAL Wahana Komunikasi dan Informasi Geografi*, 18(2), 95-104.
- Kalaiselvan, G., & Dongre, A. R. Sharing an Experience of Social Mapping Exercise at Perirural Area of Puducherry: 2012: *Nat. J. Res. Com. Med*, 1(2), 76-79.
- Keluargaharapan.com. (2016, 10 02). *14 Kriteria Miskin Menurut Standar BPS*. Retrieved 08 18, 2019, from <http://keluargaharapan.com/14-kriteria-miskin-menurut-standar-bps/>.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2018, 01 12). *DJPT KKP Siapkan Program Prioritas bagi Nelayan Indonesia*. Retrieved 08 18, 2019, from

<http://news.kkp.go.id/index.php/djpt-kkp-siapkan-program-prioritas-bagi-nelayan-indonesia/>.

- Mongabay.co.id (2017, 08 02). *Sejahterakan Pesisir, Negara Gandeng Nelayan untuk Kembangkan Wisata Bahari*. Retrieved 10 16, 2019, from <https://www.mongabay.co.id/2017/02/08/sejahterakan-pesisir-negara-gandeng-nelayan-untuk-kembangkan-wisata-bahari/>.
- Moore, S. A., Brown, G., Kobryn, H., & Strickland-Munro, J. (2017). Identifying conflict potential in a coastal and marine environment using participatory mapping. *Journal of environmental management*, 197, 706-718.
- Policy Circle. (2019). *Policy Stakeholders Analysis Tool*. Retrieved 09 02, 2019, from <http://www.policyproject.com/policycircle/content.cfm?a0=3a>.
- Pos Bali. (2017, 12 17). *Desa Meninting Gelar Festival 'Bekele' Tongkol*. Retrieved 08 17, 2018, from <https://www.posbali.id/desa-meninting-gelar-festival-bekele-tongkol/>.
- Pratiwi, A. F. (2014). *Pengaruh Pengembangan Wisata Bahari Terhadap Aktivitas Perikanan Dan Strategi Nafkah Nelayan Tanjung Benoa*. Skripsi. Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Institut Pertanian Bogor. (Unpublished).
- Radar Lombok. (2017, 02 24). *Relokasi Meninting, Warga akan Didata*. Retrieved 04 14, 2018, from <https://radarlombok.co.id/relokasi-meninting-warga-didata.html>.
- Radar Lombok. (2017, 10 30). *Potensi Objek Wisata Pantai Kongok Menting, Batulayar Digemari Wisatawan untuk Surfing, Minim Perhatian dari Pemda*. Retrieved 08 17, 2018, from <https://radarlombok.co.id/potensi-objek-wisata-pantai-kongok-menting-batulayar.html>.
- Royandi, E., Satria, A., & Saharuddin, S. (2019). Kelompok Kepentingan Dan Relasi Kuasa Dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut Palabuhanratu. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 8(2), 163-173.
- Satu Data Indonesia. (2012). *Jumlah Nelayan Nasional*. Retrieved 08 18, 2018.
- Safiullin, M. R., Ermolaeva, P. O., Yermolaev, O. P., & Selivanov, R. N. (2015). Current perspectives on social mapping of urban territories. *Asian social science*, 11(6), 207.
- Saleha, Q. (2013). Kajian Struktur Sosial dalam Masyarakat Nelayan di Pesisir Kota Balikpapan. *Buletin PSP*, 21(1), 67-75.
- Saribanon, N., et al. (2015). *Gilireng dalam Perspektif Pemetaan Sosial*. Jakarta: Energy Equitic Epic (Sengkang) Pty. Ltd dan Institut Pengembangan Masyarakat.
- Scott, N. (2017). *Developing Halal Tourism in Lombok*. Proceeding The 1st International Conference On Managing Sustainable Tourism "Indigenous, Authentic And Halal Tourism", Senggigi Lombok Indonesia:
- Lembaga Penerbit BP2EB Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram.
- Sunaryo, B. (2013). *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Tatali, A. A., Lasabuda, R., Andaki, J. A., & Lagarense, B. E. (2018). Strategi Pengembangan Pariwisata Pesisir Di Desa Bentung Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 8(1), 53-62.
- Wiratma, M. (2010). Social Mapping untuk Mengantisipasi Potensi Konflik Di Pertambangan Batubara Kabupaten Kutai Barat, Kaltim. *Humaniora*, 1(2), 760-777.
- World Bank. (2007, 07 25). *Tool Name: Social Mapping*. Retrieved 08 18, 2018.
- Zamzami, L. (2016). Partisipasi Masyarakat Nelayan Dalam Pengembangan Budaya Wisata Bahari di Kabupaten Agam. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 17(2), 131-144.

Tentang Penulis

Evi Sukmayeti menyelesaikan Magister Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Indonesia, pada tahun 2008. Penulis adalah dosen pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mataram, Indonesia, dan saat ini menjabat sebagai Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M). Penulis memiliki beberapa artikel di *Journal of Governance and Public Policy*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan *Book Chapter "Marrying Young in Indonesia: Voice, Law and Practices"* yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia bekerjasama dengan Van Vollen Hoven Institute of Leiden University.